

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NOMOR IDENTITAS TUNGGAL: BUKTI TINGKAT LOKAL DARI KOTA MAKASSAR, INDONESIA

Eko Budi Lestari¹, Eljawati², Restu Widyo Sasongko³, Ida Yunari⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

E-mail: ekobudi1524@gmail.com¹; eljawati88@gmail.com²; restu_widyo@ipdn.ac.id^{3*} (Correspondence Author);
idayunarir@ipdn.ac.id⁴

ABSTRAK. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan Nomor Identitas Tunggal (SIN) melalui pencocokan Nomor Administrasi Kependudukan (NPWP) dan Nomor Identifikasi Pajak (NPWP) di tingkat lokal, dengan Kota Makassar, Indonesia, sebagai studi kasus. Pendekatan kualitatif dalam desain studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah 15 orang yang dipilih secara purposif, terdiri dari pejabat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pejabat dan pelaksana teknis Kantor Layanan Pajak Pratama, personel layanan administrasi, dan anggota masyarakat yang merupakan wajib pajak dan telah serta belum menjalani pencocokan NIK–NPWP. Populasi adalah seluruh aktor kebijakan, pelaksana, dan kelompok sasaran kebijakan SIN di Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan studi dokumen, dan validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan teknik. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan kerangka implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, dengan fokus pada isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pencocokan NIK–NPWP telah berkembang secara normatif dan administratif, tetapi masih jauh dari optimal karena keterbatasan data teknis, koordinasi antarlembaga yang lemah, dan kesadaran serta kepatuhan masyarakat yang terbatas. Disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan SIN di tingkat lokal sangat bergantung pada bagaimana konteks implementasi diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas data demografis, dan strategi sosialisasi adaptif. Studi ini menyarankan penguatan layanan terpadu dan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan SIN di tingkat regional.

Kata Kunci: nomor identitas tunggal, implementasi kebijakan, administrasi kependudukan, pemerintah daerah.

IMPLEMENTING SINGLE IDENTITY NUMBER POLICY: LOCAL-LEVEL EVIDENCE FROM MAKASSAR CITY, INDONESIA

ABSTRACT. This study focuses on the implementation analysis of the Single Identity Number policy through the matching of the Population Administration Number and the Tax Identification Number at the local level, with Makassar City, Indonesia, as the case study. A qualitative approach in a case study design is employed in this research. Informants in this research are 15 people selected purposively, consisting of officials from the Department of Population and Civil Registration, officials and technical implementers of the Pratama Tax Service Office, administrative service personnel, and members of the public who are taxpayers and have and have not undergone NIK–NPWP matching. The population is all policy actors, implementers, and target groups of the SIN policy in Makassar City. Data collection was carried out through in-depth interviews, non-participant observation, and documentary study, and the validity of data was obtained through triangulation of sources and techniques. Data were analyzed qualitatively using Merilee S. Grindle's policy implementation framework, focusing on the content of the policy and the context of implementation. The results showed that the NIK–NPWP matching policy has developed normatively and administratively but is still far from optimum due to technical data limitations, weak interagency coordination, and limited awareness and compliance from the public. It is concluded that the local success of the SIN policy depends highly on how the context of implementation is strengthened through cross-sector coordination, demographic data quality improvement, and adaptive socialization strategies. The study suggests strengthening integrated services and improving institutional capacity to optimize SIN policy implementation at the regional level.

Keywords: single identity number, policy implementation, population administration, local government.

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan fondasi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan modern karena berfungsi sebagai basis data utama bagi pelaksanaan fungsi regulasi, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta perencanaan pembangunan. Di era transformasi digital pemerintahan saat ini, integrasi data kependudukan menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan efektivitas kebijakan publik lintas sektor, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan tata kelola berbasis data.

Namun, fragmentasi identitas dan duplikasi data kependudukan masih menjadi tantangan serius yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem identitas yang terintegrasi dan reliabel.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Nomor Identitas Tunggal (*Single Identity Number/SIN*) dengan menetapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal yang unik, berlaku seumur hidup, dan multifungsi. Kebijakan ini memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa data kependudukan yang dikelola pemerintah pusat merupakan satu-satunya rujukan resmi bagi berbagai keperluan administrasi pemerintahan. Implementasi SIN diarahkan untuk mendukung kebijakan satu data (*one data policy*), meningkatkan efisiensi birokrasi, dan memperkuat integrasi layanan publik.

Salah satu bentuk konkret dari kebijakan SIN adalah pemadanan antara NIK dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di sektor perpajakan. Integrasi ini diharapkan dapat menyederhanakan prosedur administrasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat basis data fiskal nasional. Meski demikian, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasinya di tingkat lokal, di mana terjadi interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat.

Sebagian besar kajian terdahulu lebih banyak menyoroti manfaat kebijakan identitas tunggal dari sisi normatif dan makro, seperti peningkatan efisiensi layanan publik atau penguatan tata kelola data nasional. Sementara itu, studi empiris yang menelaah implementasi kebijakan SIN di tingkat pemerintah daerah—terutama yang membahas aspek komunikasi kebijakan, koordinasi antarinstansi, kesiapan sumber daya, serta respons masyarakat—masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) dalam memahami dinamika implementasi kebijakan SIN pada konteks lokal.

Kota Makassar menjadi konteks empiris yang menarik untuk mengisi celah tersebut. Meski pernah ditetapkan sebagai daerah percontohan dalam implementasi integrasi NIK–NPWP, tingkat pemadanan yang dicapai masih tergolong rendah dibandingkan jumlah wajib pajak yang ada. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan implementasi kebijakan, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat, rendahnya akurasi data kependudukan, serta minimnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan validasi NIK.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menempatkan implementasi pemadanan NIK–NPWP sebagai objek kajian implementasi kebijakan publik pada level lokal. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi kebijakan pemadanan NIK dan NPWP dalam rangka mewujudkan *single identity number* di Kota Makassar;
2. Mengidentifikasi kendala utama yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut; dan
3. Merumuskan strategi penguatan implementasi kebijakan SIN yang kontekstual dan aplikatif bagi pemerintah daerah.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan studi administrasi publik, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan integrasi data kependudukan di Indonesia.

KERANGKA PEMIKIRAN

Implementasi kebijakan *Single Identity Number* (SIN) melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kota Makassar ditempatkan dalam konteks kebijakan publik strategis. Kebijakan ini merupakan instrumen penting negara untuk mewujudkan integrasi data kependudukan, meningkatkan efisiensi administrasi publik, serta memperkuat tata kelola layanan publik berbasis kebijakan satu data (*one data policy*). Kajian literatur dalam penelitian ini tidak hanya membahas konsep kebijakan publik dan administrasi kependudukan, tetapi juga berfokus pada teori implementasi kebijakan, yang dijadikan pisau analisis utama.

Kebijakan integrasi NIK–NPWP dikategorikan sebagai kebijakan publik karena melibatkan keputusan negara yang bersifat mengikat dan berdampak luas bagi masyarakat. Kebijakan ini memiliki sifat regulatif

sekaligus distributif: di satu sisi mengatur kewajiban administrasi kependudukan dan perpajakan, sementara di sisi lain memberikan manfaat berupa kemudahan akses layanan publik dan kepastian identitas hukum.

Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan regulasi yang tepat, tetapi terutama oleh efektivitas implementasinya di lapangan. Implementasi menjadi tahap krusial yang menjembatani antara rancangan normatif kebijakan dengan realitas empiris masyarakat. Proses ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan juga arena interaksi kompleks antara aktor, kepentingan, sumber daya, serta konteks sosial-politik.

Untuk itu, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, yang memandang implementasi sebagai proses politik sekaligus administratif. Model ini relevan digunakan karena mampu menjelaskan implementasi secara komprehensif melalui dua dimensi utama, yakni isi kebijakan (*policy content*) dan konteks implementasi (*policy context*).

Dalam dimensi isi kebijakan, Grindle menyoroti beberapa unsur kunci:

1. Kepentingan pihak-pihak yang terpengaruh oleh kebijakan,
2. Jenis manfaat yang dihasilkan,
3. Derajat perubahan yang diharapkan,
4. Posisi pengambilan keputusan,
5. Pelaksana program, dan
6. Sumber daya yang digunakan.

Dalam konteks integrasi NIK–NPWP, kebijakan ini melibatkan kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, otoritas pajak, serta masyarakat sebagai wajib pajak. Manfaat kebijakan bersifat jangka panjang (penyederhanaan identitas dan efisiensi layanan publik), sementara biaya adaptasi dan risiko kesalahan data dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dan kepatuhan publik.

Dimensi kedua, yaitu konteks implementasi, mencakup:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat,
2. Karakteristik lembaga pelaksana, serta
3. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.

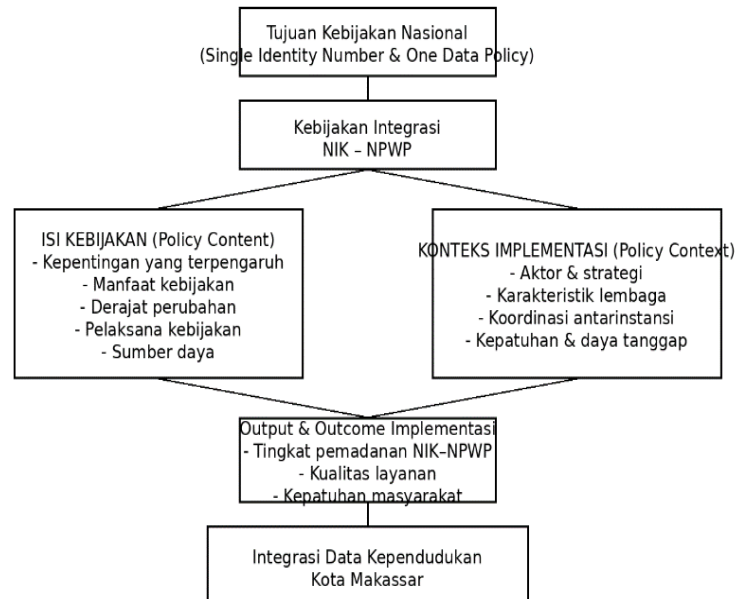
Hasil kajian literatur dan temuan empiris menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi, fragmentasi kewenangan antara Disdukcapil dan Direktorat Jenderal Pajak, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap keamanan data pribadi merupakan faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan SIN di tingkat daerah.

Dalam perspektif administrasi kependudukan, kebijakan SIN memiliki landasan normatif dan operasional yang kuat. Administrasi kependudukan tidak hanya menghasilkan dokumen identitas, tetapi juga data strategis bagi perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, NIK berfungsi sebagai identitas tunggal yang melekat pada individu dan menjadi pintu masuk integrasi berbagai layanan publik lintas sektor.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi SIN bergantung pada kualitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK), kapasitas sumber daya manusia, serta intensitas sosialisasi kepada masyarakat. Literatur terdahulu menegaskan bahwa kegagalan implementasi integrasi identitas biasanya disebabkan oleh masalah teknis data, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan rendahnya kesadaran administratif masyarakat.

Berdasarkan kajian teoretis dan empiris tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan implementasi kebijakan integrasi NIK–NPWP sebagai variabel sentral yang dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi sebagaimana dirumuskan dalam model Grindle. Keberhasilan atau kegagalan implementasi tercermin pada tingkat pematangan NIK–NPWP, kualitas layanan, serta respons dan kepatuhan masyarakat di Kota Makassar. Dengan demikian, analisis implementasi kebijakan SIN pada level lokal menjadi kunci untuk menjelaskan kesenjangan antara tujuan kebijakan nasional dan realisasi empiris di daerah, dapat dijelaskan pada bagan di bawah ini :

Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : diolah Penulis, 2025

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam (*in-depth understanding*) mengenai implementasi kebijakan *Single Identity Number* (SIN) dalam konteks integrasi data kependudukan di tingkat lokal. Pendekatan kualitatif dipandang relevan karena penelitian berfokus pada makna, proses, interaksi antaraktor, serta dinamika kelembagaan dalam implementasi kebijakan publik.

Desain studi kasus dipilih karena penelitian ini mengkaji secara intensif dan terperinci satu kasus spesifik, yakni implementasi kebijakan pepadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kota Makassar. Studi kasus ini bersifat instrumental dan kolektif, dimana kasus dipelajari bukan semata-mata untuk kepentingan kasus itu sendiri, tetapi sebagai instrumen untuk memahami fenomena implementasi kebijakan *single identity number* secara lebih luas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, dengan pertimbangan kompetensi, keterlibatan langsung, serta pengetahuan informan terhadap kebijakan yang diteliti (*rich information cases*). Penelitian ini tidak menggunakan teknik sampling probabilistik, melainkan menekankan kualitas dan kedalaman informasi. Informan penelitian berjumlah 15 orang, yang terdiri atas:

1. Pejabat struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar (4 orang);
2. Pejabat dan pelaksana teknis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Makassar (4 orang);
3. Petugas pelaksana layanan administrasi kependudukan dan data perpajakan (4 orang);
4. Masyarakat/wajib pajak yang telah dan belum melakukan pepadanan NIK–NPWP (3 orang).

Secara demografis, informan berasal dari latar belakang usia produktif (30–55 tahun), memiliki tingkat pendidikan minimal diploma hingga pascasarjana, serta pengalaman kerja birokrasi di atas lima tahun bagi informan aparatur pemerintah. Karakteristik ini dipandang memadai untuk merepresentasikan aktor kebijakan, pelaksana teknis, dan kelompok sasaran kebijakan.

Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai institusi kunci implementasi kebijakan. Secara temporal, penelitian berlangsung selama enam bulan, yakni dari Februari

hingga Juli 2024, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi nonpartisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan penggalan data yang fleksibel namun tetap terarah sesuai fokus penelitian. Observasi digunakan untuk mencermati praktik pelayanan, interaksi antarinstansi, serta respons masyarakat di lokasi penelitian. Dokumentasi meliputi peraturan perundang-undangan, laporan instansi, data statistik, dan arsip kebijakan terkait pemadanan NIK–NPWP.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dengan membandingkan informasi antar-informan, hasil wawancara dengan observasi, serta data lapangan dengan dokumen resmi. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas temuan penelitian. Sebagai penelitian kualitatif bidang pemerintahan, analisis data bertumpu pada model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, yang membedakan faktor isi kebijakan (*policy content*) dan konteks implementasi (*policy context*). Model ini dijadikan pisau analisis utama untuk menafsirkan dinamika implementasi kebijakan *single identity number*. Rumah Tema Penelitian disusun dengan struktur sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan *Single Identity Number* sebagai tema utama;
2. Isi Kebijakan (kepentingan yang terpengaruhi, jenis manfaat, derajat perubahan, aktor pembuat dan pelaksana kebijakan, serta sumber daya);
3. Konteks Implementasi (kekuasaan dan strategi aktor, karakteristik kelembagaan, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap)
4. Kendala Implementasi; dan
5. Strategi Optimalisasi Implementasi.

Struktur Rumah Tema ini menegaskan benang merah antara tujuan penelitian, kerangka teoretis, dan temuan empiris, sekaligus memperkuat karakter penelitian kualitatif pemerintahan yang menekankan analisis proses, aktor, dan konteks kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemadanan NIK dan NPWP di Kota Makassar

Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemadanan NIK dan NPWP sebagai bagian dari upaya mewujudkan *single identity number* di tingkat lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, implementasi kebijakan ini telah memiliki landasan hukum yang kuat, baik melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan maupun Peraturan Menteri Keuangan terkait penggunaan NIK sebagai NPWP. Di tingkat Kota Makassar, kebijakan tersebut direspons dengan dukungan administratif dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), terutama melalui penyediaan dan pemutakhiran data kependudukan yang menjadi basis pemadanan.

Namun demikian, secara empiris, implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal. Data menunjukkan bahwa meskipun seluruh penduduk Kota Makassar telah memiliki NIK, tingkat pemadanan NIK dengan NPWP dan kepatuhan pelaporan pajak masih relatif rendah dibandingkan jumlah wajib pajak terdaftar. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan (*policy goals*) dan hasil implementasi (*policy outcomes*).

Jika dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Grindle, isi kebijakan (*policy content*) pada dasarnya bersifat progresif karena memberikan manfaat luas, baik bagi pemerintah (perluasan basis pajak dan akurasi data) maupun masyarakat (penyederhanaan identitas dan layanan publik). Akan tetapi, derajat perubahan yang diharapkan dari kebijakan ini tergolong tinggi, karena menuntut perubahan perilaku administratif masyarakat serta peningkatan kapasitas koordinasi antarlembaga pelaksana. Tingginya derajat perubahan ini menjadikan implementasi kebijakan relatif kompleks dan memerlukan dukungan konteks implementasi yang kuat.

Kendala Implementasi Kebijakan Pemadanan NIK dan NPWP

Tujuan kedua penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis kendala dalam implementasi kebijakan pemadanan NIK dan NPWP di Kota Makassar. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kendala implementasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama.

1. Kendala teknis-administratif, berupa ketidaksesuaian data kependudukan, kesalahan penulisan NIK, serta keterbatasan akses konsolidasi data yang masih terpusat di tingkat nasional. Kondisi ini menyebabkan sebagian wajib pajak mengalami kegagalan validasi saat melakukan pemadanan NIK dan NPWP.
2. Kendala institusional, khususnya terkait koordinasi dan komunikasi antarlembaga. Penelitian menemukan bahwa sinergi antara Disdukcapil dan Kantor Pelayanan Pajak belum sepenuhnya terbangun secara sistematis, terutama dalam hal sosialisasi, asistensi layanan, dan penanganan pengaduan masyarakat. Akibatnya, implementasi kebijakan cenderung berjalan sektoral dan kurang terintegrasi.
3. Kendala sosial dan perilaku, yang ditandai oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan dan perpajakan, serta masih adanya keraguan terhadap keamanan data pribadi. Rendahnya kepatuhan ini memperlemah konteks implementasi kebijakan, khususnya pada dimensi *compliance and responsiveness* sebagaimana dikemukakan Grindle.

Dengan demikian, kendala implementasi tidak semata-mata bersumber dari aspek kebijakan itu sendiri, melainkan lebih dominan dipengaruhi oleh konteks implementasi yang belum sepenuhnya kondusif.

Strategi Optimalisasi Implementasi Kebijakan *Single Identity Number*

Tujuan ketiga penelitian ini adalah menganalisis strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan *single identity number* di Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang telah ditempuh pemerintah, seperti penetapan batas waktu pemadanan dan ancaman sanksi administratif, relatif efektif sebagai *coercive instrument* untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun, strategi tersebut belum cukup apabila tidak diimbangi dengan pendekatan persuasif dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Strategi optimalisasi yang direkomendasikan meliputi:

1. Penguatan koordinasi dan kerja sama formal antara Disdukcapil dan Direktorat Jenderal Pajak melalui mekanisme layanan terpadu;
2. Intensifikasi sosialisasi berbasis wilayah dan kelompok sasaran untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat; serta
3. Peningkatan kualitas data kependudukan melalui pemutakhiran berkelanjutan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, strategi tersebut bertujuan memperkuat konteks implementasi, khususnya pada aspek karakteristik lembaga pelaksana dan daya tanggap terhadap kebutuhan kelompok sasaran. Dengan konteks implementasi yang lebih adaptif, kebijakan *single identity number* diharapkan dapat menghasilkan dampak yang lebih signifikan bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Sintesis Pembahasan

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemadanan NIK dan NPWP di Kota Makassar telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Ketidaksinkronan antara isi kebijakan yang progresif dan konteks implementasi yang belum matang menjadi faktor utama penghambat pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan *single identity number* di tingkat lokal sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membangun koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas institusi, serta mendorong partisipasi dan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NOMOR IDENTITAS TUNGGAL:
BUKTI TINGKAT LOKAL DARI KOTA MAKASSAR, INDONESIA
(Eko Budi Lestari, Eljawati, Restu Widyo Sasongko, Ida Yunari)

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan *single identity number* melalui pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kota Makassar, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Implementasi kebijakan pemadanan NIK dan NPWP di Kota Makassar telah berjalan secara normatif dan administratif, ditopang oleh kerangka regulasi nasional yang kuat serta dukungan kelembagaan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Direktorat Jenderal Pajak. Kebijakan ini memiliki isi kebijakan yang progresif karena memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat, terutama dalam integrasi data kependudukan, perluasan basis pajak, dan penyederhanaan akses layanan publik. Namun, capaian implementasi di tingkat lokal belum optimal, terlihat dari masih rendahnya tingkat pemadanan dan kepatuhan wajib pajak dibandingkan jumlah wajib pajak terdaftar.
2. Kendala utama implementasi lebih banyak bersumber dari konteks implementasi, bukan dari substansi kebijakan. Hambatan tersebut mencakup:
 - a. Aspek teknis-administratif, seperti ketidakakuratan data kependudukan dan keterbatasan akses sistem;
 - b. Aspek kelembagaan, yakni lemahnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi pelaksana; serta
 - c. Aspek sosial, berupa rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan dengan tingkat perubahan tinggi membutuhkan dukungan kelembagaan dan lingkungan implementasi yang lebih matang agar dapat mencapai hasil yang diharapkan.

3. Strategi optimalisasi implementasi kebijakan SIN di Kota Makassar belum sepenuhnya terintegrasi dan berkelanjutan. Pendekatan koersif seperti penetapan batas waktu dan sanksi administratif cukup efektif dalam jangka pendek, namun belum mampu membangun kepatuhan yang berkelanjutan. Optimalisasi implementasi menuntut pendekatan yang lebih komprehensif melalui:
 - a. Penguatan koordinasi lintas instansi,
 - b. Peningkatan kualitas data dan kapasitas aparatur, serta
 - c. Sosialisasi yang adaptif dan partisipatif.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan *Single Identity Number* sangat bergantung pada keseimbangan antara kekuatan regulasi, kapasitas institusional, dan penerimaan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran berikut diajukan sebagai rekomendasi kebijakan dan pengembangan keilmuan.

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme koordinasi dan integrasi kelembagaan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kantor Pelayanan Pajak, baik melalui kerja sama formal maupun penyelenggaraan layanan terpadu. Koordinasi yang kuat diperlukan untuk memastikan konsistensi data, efektivitas sosialisasi, serta kemudahan layanan pemadanan bagi masyarakat.
2. Peningkatan kualitas dan akurasi data kependudukan harus menjadi prioritas utama, melalui pemutakhiran data secara berkelanjutan, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Data kependudukan yang valid dan terintegrasi merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan kebijakan *single identity number*.
3. Strategi sosialisasi kebijakan perlu dirancang secara lebih adaptif dan partisipatif, dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan tingkat literasi administrasi masyarakat. Sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan dan perlindungan data pribadi.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian, baik melalui pendekatan komparatif antar daerah maupun dengan mengintegrasikan perspektif kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan *single identity number* terhadap kepatuhan pajak dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, pengembangan kebijakan dapat dilakukan secara lebih berbasis bukti (*evidence-based policy*).

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (1994). *Public policy making: An introduction*. Mifflin.
- Baihaqi, I. (2023). *Efektivitas Pasal 2 (1a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terhadap pencantuman NIK sebagai NPWP perspektif masalah mursalah (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].
- Barata, M. F. (2016). *Kebijakan Kominfo dalam pemberitaan anak*. Kementerian Komunikasi dan Informatika & Smeru Research Institute.
- Bisnis.com. (2023, 26 Oktober). *Ditjen Pajak: 59,09 juta NIK sudah terintegrasi NPWP*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231026/259/1708071/>
- Carr, C. T., & Hayes, R. A. (2015). Social media: Defining, developing, and divining. *Atlantic Journal of Communication*, 23(1). <https://doi.org/10.1080/15456870.2015.972282>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. (t.t.). *Sekilas pandang nomor induk kependudukan*. <https://disdukcapil.bogorkab.go.id/post>
- Dye, T. R. (1978). *Understanding public policy*. Prentice Hall.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Gatiningsih, Santoso, E. B., & Irena, D. (2012). *Sistem informasi administrasi kependudukan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Gondohanindjo, J. (2012). KTP elektronik (e-KTP) bagi penduduk Indonesia. *Majalah Ilmiah Informatika*, 3(1).
- Grindle, M. S. (1990). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy*. SAGE Publications.
- HNG.co.id. (t.t.). *Integrasi data NIK dan NPWP: Indonesia siap-siap menuju single identity number!* <https://hng.co.id/>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (t.t.). *Perpres No. 83 Tahun 2021: NIK wajib digunakan untuk pelayanan publik*. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/861>
- Labolo, M. (2010). *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. RajaGrafindo Persada.
- Lusmiarwan, R. D., & Supangkat, S. H. (2006). Perancangan prototype single identity number (SIN) untuk menunjang e-Government. *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia*. Institut Teknologi Bandung.
- Mazmanian, D. H., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. HarperCollins.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Novia, N. A., Dhelniati, F., Putra, M. Y. E., Amelia, R., & Suriyanti, L. H. (2023). Eksistensi single identity number melalui NIK menjadi NPWP terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, efektifkah? *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 482–405. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i2.19987>
- Pabeta, C. A. E., Avriella, O., Septiani, C., Mike, S., & Palalangan, C. A. (2023). Penerapan sistem single identity number setelah pemberlakuan peraturan NIK menjadi NPWP. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, 4(1), 171–182.
- Pemerintah Kota Makassar (PPID Makassar). (t.t.). *Makassar jadi role model penerapan pengintegrasian NIK dan NPWP*. <https://ppid.makassarkota.go.id/home/detailberita/1436>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Rahardjo, M. (2017). *Studi kasus dalam penelitian kualitatif: Konsep dan prosedurnya*. Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rofita, R. R., & Prasojo, E. (2022). Governance networks dalam implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan guna mewujudkan single identity number. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Transparansi*, 5(1), 26–37.
- Setiawan, D. A. (2022). *Apa itu single identity number?* Belasting.id. <https://www.belasting.id>
- Siregar, T. (2017). Penetapan single identity number dalam rangka pemenuhan kepatuhan kewajiban perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 80–85.
- Soemartono, T., & Hendrastuti, S. (2011). *Administrasi kependudukan berbasis registrasi*. Yayasan Bina Profesi Mandiri.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*. Brilliant.
- Suratha, I. G. (2019). *NIK sebagai single identity number bukan wacana tapi amanat UU*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan. <https://disdukcapil.waykanankab.go.id>
- Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. AIPI.
- Widianto, R. (t.t.). Penerapan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai single identity number (SIN). *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(1).
- Sekilas Pandang Nomor Induk Kependudukan. <https://disdukcapil.bogorkab.go.id/post>. (diakses 25/2/2024)
- <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/861>. Perpres No. 83 Tahun 2021: NIK Wajib Digunakan untuk Pelayanan Publik. (diakses 25/2/2024)
- <https://hng.co.id/>. Integrasi Data NIK dan NPWP: Indonesia Siap-siap Menuju Single Identity Number! (diakses 25/2/2024)
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231026/259/1708071/>. Ditjen Pajak: 59,09 Juta NIK sudah Terintegrasi NPWP. (diakses 25/2/2024)
- <https://ppid.makassarkota.go.id/home/detailberita/1436>. Makassar Jadi Role Model Penerapan Pengintegrasian NIK dan NPWP. (diakses 25/2/2024)